

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2014

OUTLINE ANALISIS PROVINSI

1. Perkembangan Indikator Utama
 - 1.1 Pertumbuhan Ekonomi
 - 1.2 Pengurangan Pengangguran
 - 1.3 Pengurangan Kemiskinan
2. Kinerja Pembangunan Kota/ Kabupaten
 - 2.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan kemiskinan
 - 2.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM
 - 2.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran
 - 2.4 Kesenjangan Wilayah
3. Penyebab Permasalahan Pembangunan
 - 3.1 Tingginya Ketergantungan terhadap Sektor Primer (Pertanian)
 - 3.2 Kurangnya Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
 - 3.3 Rendahnya Kualitas lapangan Kerja
 - 3.4 Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah
 - 3.5 Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia
 - 3.6 Terbatasnya Mobilitas Tabungan Masyarakat
 - 3.7 Rendahnya Kualitas Belanja Daerah
4. Prospek Pembangunan Tahun 2015
5. Penutup
 - 5.1 Isu Strategis Daerah
 - 5.2 Rekomendasi Kebijakan



Desember 2014

SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

Perkembangan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur 2014

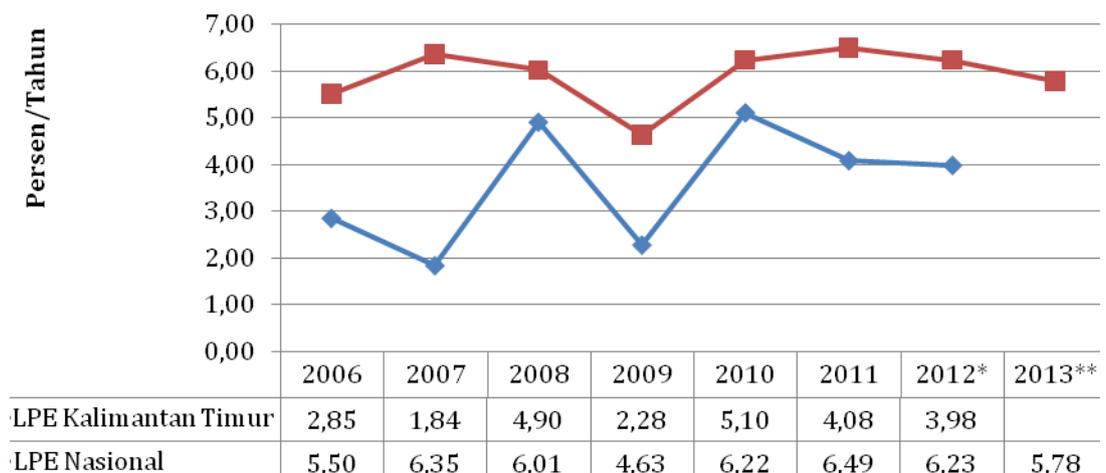
SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

A. Perkembangan Indikator Utama

1. Pertumbuhan Ekonomi

Provinsi Kalimantan Timur mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional terutama terkait dengan sektor industri minyak dan gas bumi. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu sentra produksi terbesar nasional untuk gas alam cair. Di sektor perekonomian lain, hanya kehutanan yang memberikan kontribusi terhadap kinerja perekonomian Kalimantan Timur. Selama periode 2006-2013 kinerja perekonomian Provinsi Kalimantan Timur relatif baik. Perekonomian daerah bertumbuh pada laju rata-rata 3,58 persen per tahun, di bawah laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,90 persen per tahun (Gambar 1). Fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi terjadi pada tahun 2007 dan 2009 yang diakibatkan oleh terjadinya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan krisis ekonomi global. Dari perspektif wilayah, kontribusi PDRB Kalimantan Timur terhadap output wilayah Kalimantan sebesar 66,96 persen, dan berkontribusi sebesar 6,22 persen terhadap pembentukan PDB nasional. Dari sisi besaran, perekonomian Kalimantan Timur menduduki peringkat pertama di Wilayah Kalimantan.

Gambar 1
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2000

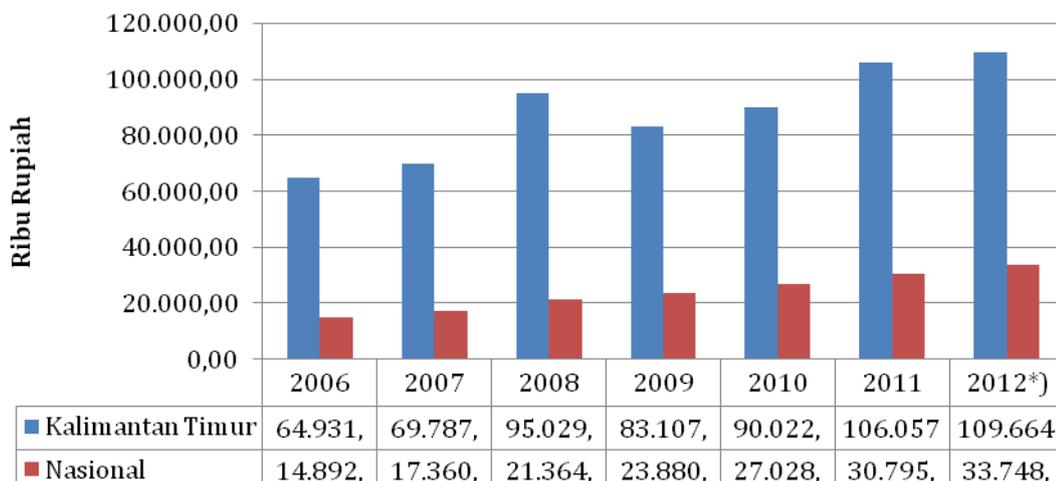


Sumber: BPS, 2013

Laju pertumbuhan ekonomi daerah masih berada di bawah laju pertumbuhan nasional, serta belum mampu menutup kesenjangan pendapatan perkapita dari rata-rata

pendapatan perkapita nasional. Rasio PDRB per kapita antara Kalimantan Timur dan nasional menurun tajam dari 436,01 persen menjadi 324,95 persen selama periode 2006-2012 (Gambar 2). Namun demikian, PDRB perkapita Kalimantan Timur berada pada posisi pertama di Wilayah Kalimantan.

Gambar 2.
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku

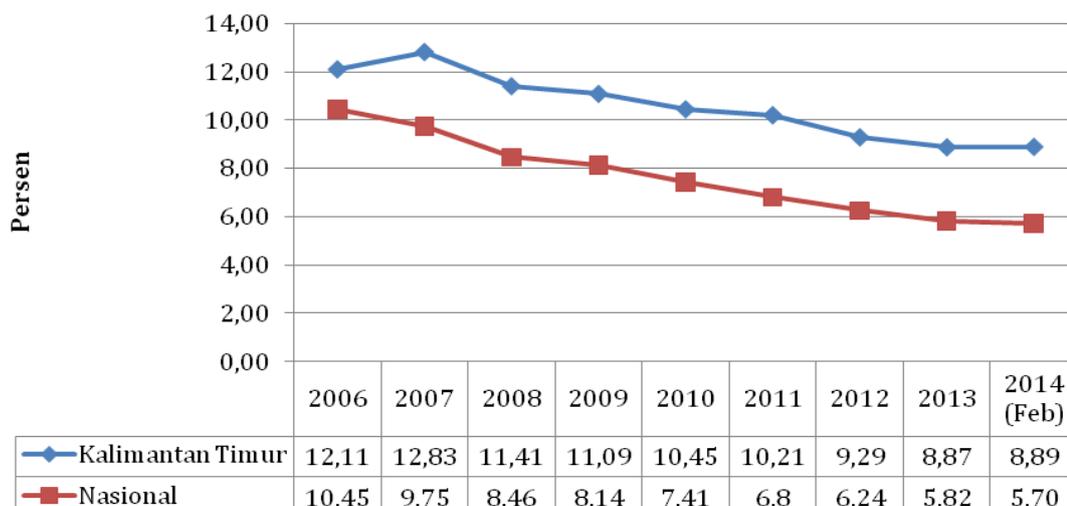


Sumber: BPS, 2013

2. Pengurangan Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka Kalimantan Timur selama 2006-2013 berkurang sebesar 3,24 persen (Gambar 3). *Trend* peningkatan pengangguran terbuka terjadi pada tahun 2006-2007 yang utamanya disebabkan kenaikan harga BBM. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor ekonomi di Kalimantan Timur masih sangat sensitif terhadap gejolak harga BBM. Perbandingan secara nasional menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Kalimantan Timur jauh lebih tinggi dari angka rata-rata nasional.

Gambar 3.
Tingkat Pengangguran Terbuka



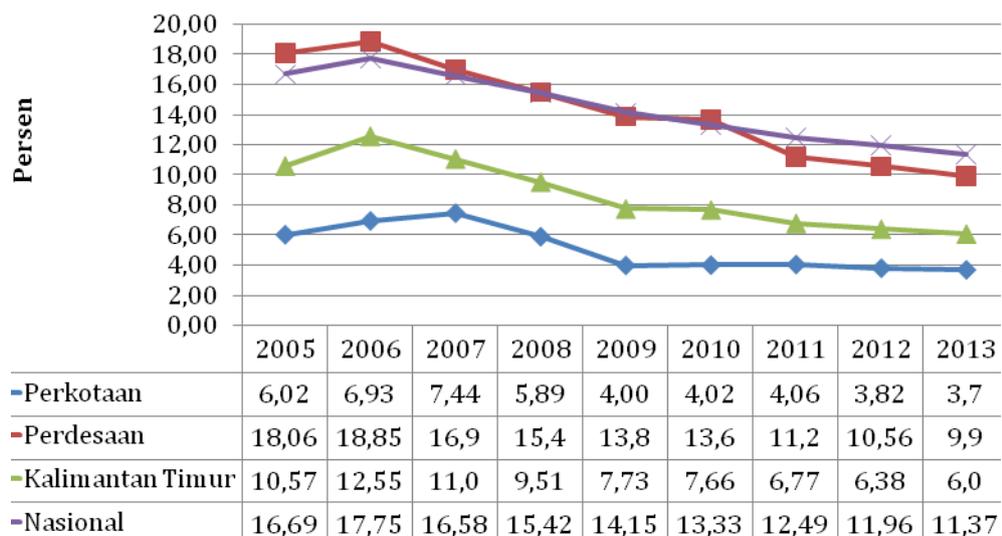
Sumber: BPS, 2014

Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang rendah disertai dengan tingkat pengangguran terbuka yang tinggi, hal ini mengindikasikan bahwa sektor utama penopang pertumbuhan ekonomi daerah belum mampu menyerap tenaga kerja lebih besar, serta terbatasnya nilai tambah yang diciptakan perekonomian daerah. Tantangan yang harus diatasi adalah peningkatan produktivitas sektor yang mampu menyerap tenaga kerja yang relatif tinggi.

3. Pengurangan Kemiskinan

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan penurunan pengangguran, tingkat kemiskinan daerah mengalami penurunan. Selama periode 2006-2013, persentase penduduk miskin menurun dari 12,55 persen menjadi 6,06 persen (Gambar 4). Tantangan yang harus dihadapi adalah tingginya tingkat kemiskinan di perdesaan dengan laju penurunan yang relatif lambat. Hal ini menegaskan adanya stagnasi pertumbuhan sektor pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya di perdesaan.

Gambar 4
Persentase Penduduk Miskin



Sumber: BPS, 2013

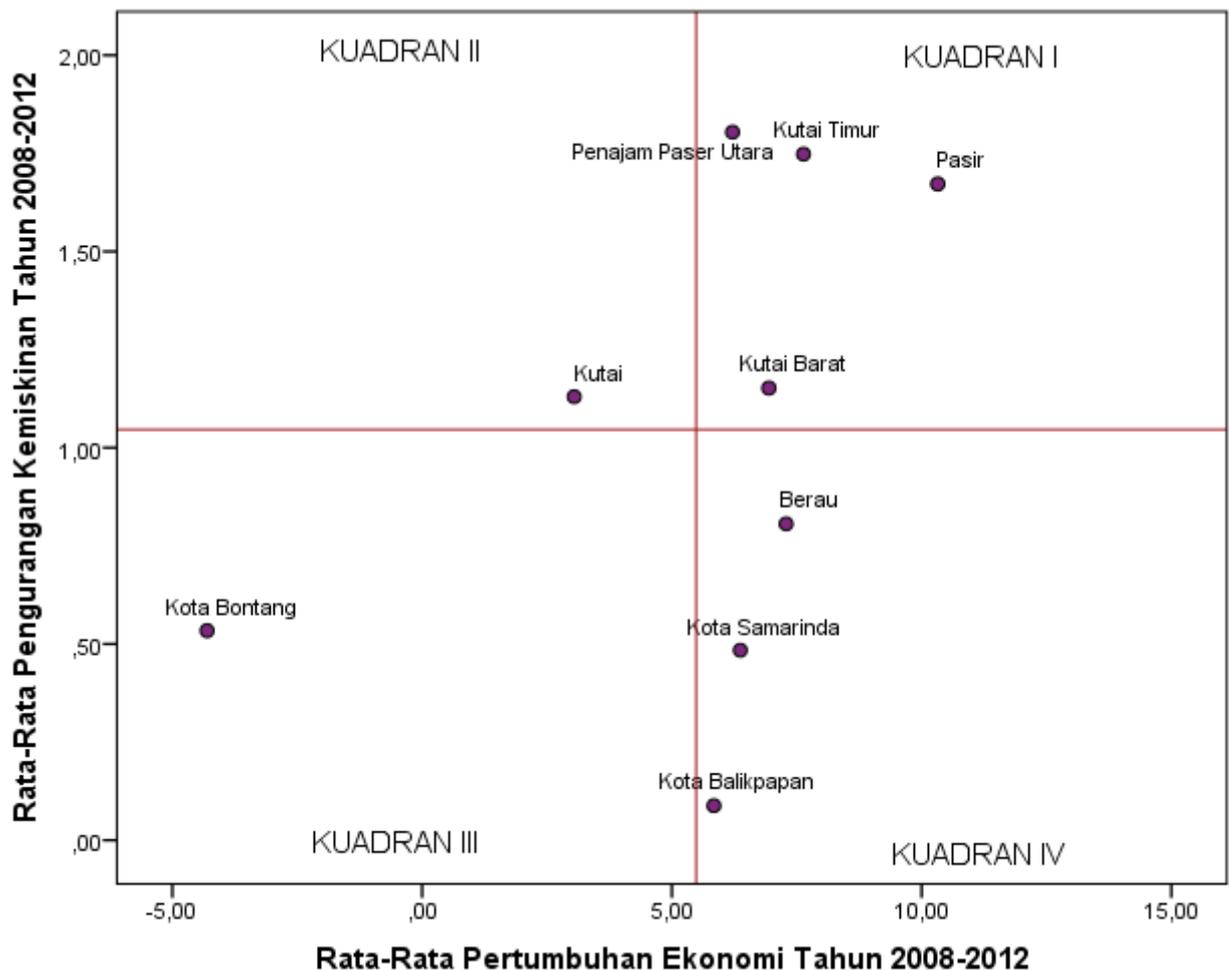
B. Kinerja Pembangunan Kabupaten/ Kota

Kualitas pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh pengurangan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta perluasan lapangan kerja.

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan

Gambar 5 menunjukkan persebaran kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, dengan penjelasan sebagai berikut..

Gambar 5
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Pertama, Kabupaten Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Pasir Dan Kutai Barat termasuk kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat mendorong pengurangan kemiskinan secara lebih cepat (*pro-growth, pro-poor*). Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap meningkatkan upaya pengurangan kemiskinan.

Kedua, Kabupaten Kutai terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di atas rata-rata (*low growth, pro-poor*). Tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan

secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan dan jasa.

Ketiga, Kabupaten Kota Bontang terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-poor*). Kinerja pembangunan daerah tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dari golongan miskin. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan.

Keempat, Kabupaten Berau, Kota Samarinda, dan Kota Balikpapan terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro poor*). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut belum memberi dampak penurunan angka kemiskinan secara nyata. Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Tantangan lainnya adalah meningkatkan koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

2. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM

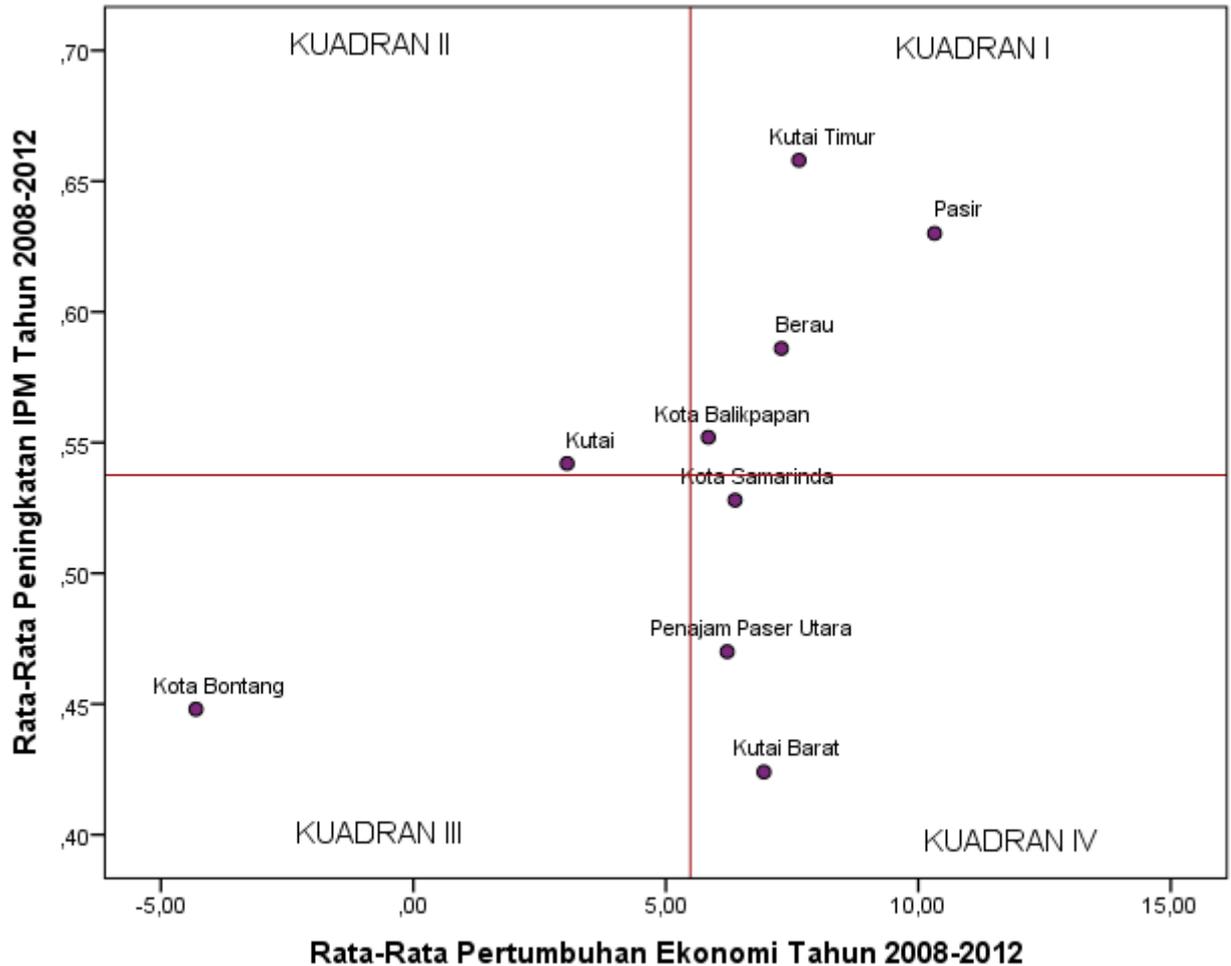
Gambar 6 menunjukkan distribusi kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama tahun 2008-2012. *Pertama*, Kabupaten Kutai Timur, Paser, Berau, dan Kota Balikpapan termasuk daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan IPM (*pro-growth, pro-human development*). Dengan kinerja yang baik ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Kedua, Kabupaten Kutai yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi peningkatan IPM di atas rata-rata (*low growth, pro-human development*). Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat meningkatkan IPM. Tantangan yang harus diatasi adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya lokal seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

Ketiga, Kota Bontang terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-human development*). Kondisi ini menegaskan perlunya pemerintah daerah membenahi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus

bekerja keras mendorong seluruh SKPD untuk memacu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah.

Gambar 6
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Peningkatan IPM Tahun 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

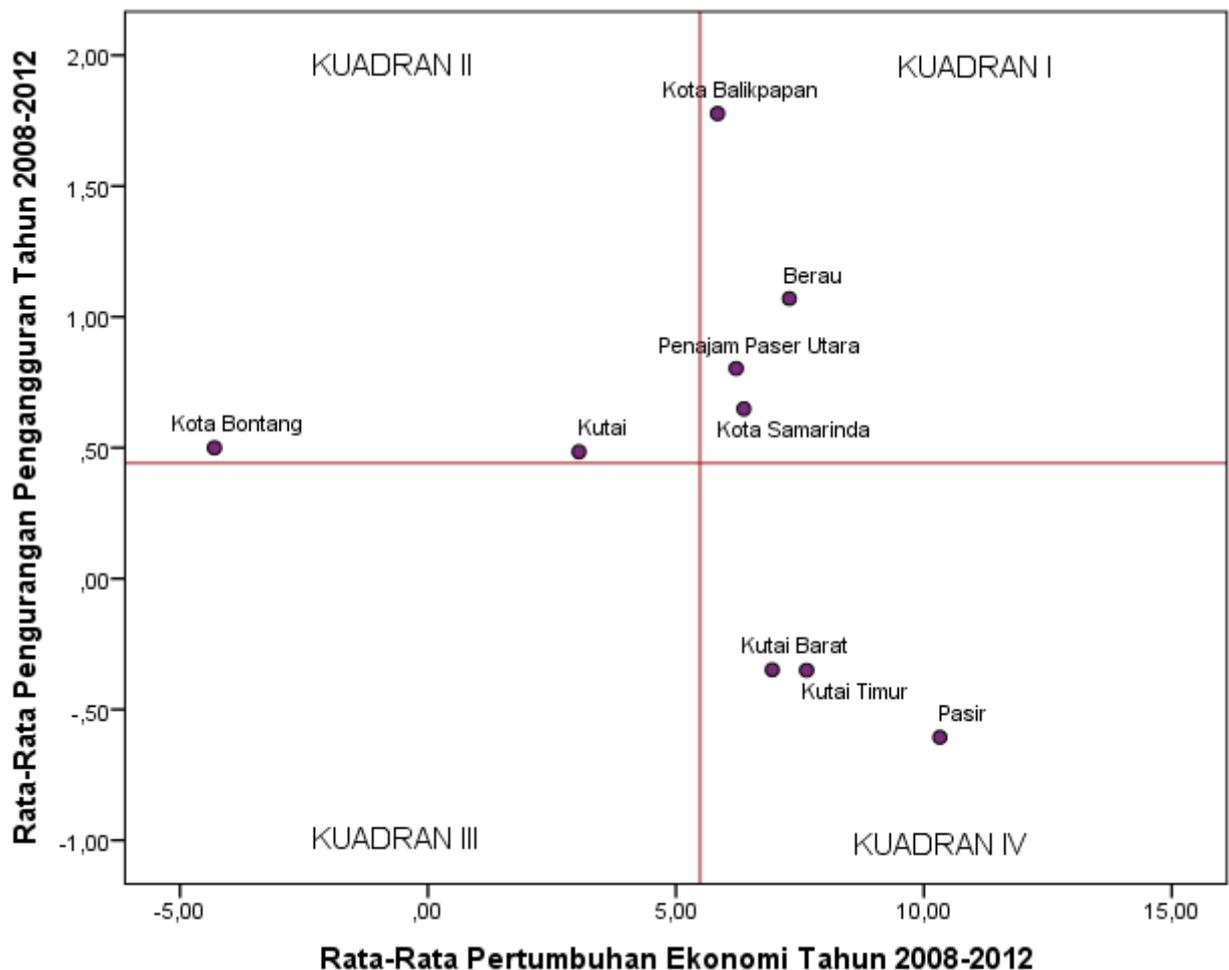
Keempat, Kabupaten Panajam Paser Utara, Kutai Barat, dan Kota Samarinda terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro human development*). Tantangan bagi pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

3. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran

Gambar 7 menunjukkan persebaran kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran selama tahun 2008-2012. *Pertama*, Kabupaten Berau, Penajam Paser Utara, Kota Samarinda, dan Kota Balikpapan termasuk kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa

pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (*pro-growth, pro-job*). Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

Gambar 7
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Rata-Rata Pengurangan Jumlah Pengangguran Tahun 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Kedua, Kabupaten Kutai dan Kota Bontang yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di atas rata-rata (*low growth, pro-job*). Hal ini mengindikasikan bahwa perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti pertanian dan perikanan.

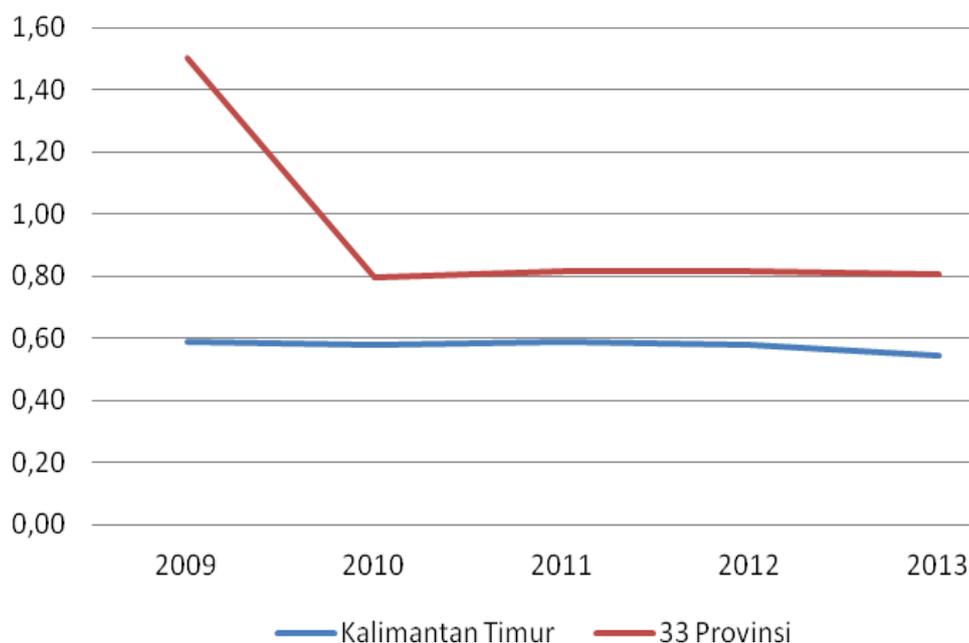
Ketiga, tidak ada kabupaten dan kota yang terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-job*). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar.

Keempat, Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur, dan Pasir terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro job*). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut, tetapi tidak dapat menurunkan jumlah pengangguran. Daerah tersebut termasuk daerah perkebunan, dan daerah perkotaan yang harus menampung migrasi penduduk dari daerah perdesaan. Tantangan yang harus dihadapi adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan. Tantangan lainnya adalah mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang mampu menyerap tenaga kerja di sektor informal.

4. Kesenjangan Ekonomi

Tingkat kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang ditunjukkan dengan nilai indeks wiliamson dari tahun 2009-2013 cukup tinggi. Kesenjangan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur masih berada di bawah nasional dengan kecenderungan semakin meningkat. Penyebab kesenjangan ekonomi Kalimantan Timur adalah keberadaan sumber daya alam terutama minyak dan gas bumi yang meningkatkan perekonomian daerah sehingga meninggalkan daerah lain yang struktur perekonomiannya di sektor pertanian.

Gambar 8
Perkembangan Kesenjangan Ekonomi (Indeks Williamson) 2009-2013



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur cukup tinggi, terlihat dari besarnya gap antara kabupaten atau kota dengan PDRB perkapita tertinggi dan PDRB perkapita terendah. Tingginya pendapatan per kapita di Kota Bontang

dan Kutai didukung oleh sumber daya alam yang dimiliki, yaitu minyak dan gas bumi. Tingginya perekonomian di kedua daerah ini meningkatkan pendapatan perkapita daerah.

Tabel 1
Perkembangan Nilai PDRB Perkapita ADHB dengan Migas Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2007-2012 (000/jiwa)

Kab/ Kota	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Pasir	29.685	40.468	44.752	57.002	69.727	72.064
Kutai Barat	25.427	66.060	36.341	41.191	47.144	51.718
Kutai	128.591	178.177	148.760	159.358	191.693	195.853
Kutai Timur	84.476	106.237	114.826	132.993	172.298	179.411
Berau	34.682	37.401	40.490	44.882	51.652	55.640
Penajam Paser Utara	21.516	25.099	24.809	27.081	31.864	34.750
Kota Balikpapan	54.987	73.192	67.323	73.339	78.007	79.048
Kota Samarinda	24.070	27.456	29.841	32.354	44.470	46.015
Kota Bontang	416.450	557.022	378.700	369.318	415.792	443.668
KALIMANTAN TIMUR	69.787	95.096	83.108	90.023	106.058	109.664

Sumber: BPS, 2013

C. Penyebab Permasalahan Pembangunan

1. Ketergantungan pada Primer (Pertambangan)

Sektor pertambangan dan penggalian memegang peran terbesar dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur dengan pangsa sekitar 42,91 persen (Tabel 2). Laju pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian cukup tinggi bila dibandingkan sektor lain di Provinsi Kalimantan Timur. Sektor industri pengolahan yang juga memegang peranan penting didalam perekonomian Kalimantan Timur terus mengalami perlambatan yang signifikan. Disamping itu, sektor pertanian yang diharapkan melaju dengan pesat mengalami perlambatan dan kontribusinya semakin menurun didalam perekonomian Kalimantan Timur.

Tabel 2
Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha (2013)

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Pertanian	6,74	5,39
2.	Pertambangan	42,91	31,388
3.	Industri Pengolahan	24,55	31,88
4.	Listrik, Gas, Air Minum	0,28	16,32
5.	Konstruksi	3,41	0,28
6.	Perdagangan, Hotel, Restoran	9,61	3,77
7.	Angkutan, Telekomunikasi	4,41	5,28
8.	Keuangan	3,52	3,30
9.	Jasa-jasa	4,57	1,90
		100,00	100,00

Sumber: BPS, 2013

Perkembangan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur juga dilihat dari perkembangan sektor yang menghasilkan barang yang dapat diperdagangkan (*tradeable sector*), sektor utama (basis) Provinsi Kalimantan Timur adalah pertambangan dan penggalian (Tabel 3)

Tabel 3
Nilai LQ Sektor Perekonomian Kalimantan Timur 2008-2012

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	0,49	0,48	0,50	0,53	0,54
a. Tanaman Bahan Makanan	0,20	0,19	0,20	0,19	0,20
b. Tanaman Perkebunan	0,46	0,53	0,57	0,64	0,69
c. Peternakan	0,45	0,46	0,46	0,48	0,48
d. Kehutanan	2,53	2,33	2,23	2,22	2,23
e. Perikanan	0,68	0,73	0,79	0,88	0,87
2. Pertambangan dan Penggalian	4,74	4,86	5,12	5,49	5,84
a. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	4,18	4,23	4,12	3,89	3,75
b. Pertambangan Bukan Migas	7,08	7,21	8,01	9,31	10,15
c. Penggalian	0,61	0,63	0,65	0,66	0,67
3. Industri Pengolahan	1,19	1,15	1,08	0,98	0,89
a. Industri Migas	11,60	11,44	11,02	10,52	9,93
1). Pengilangan Minyak Bumi	5,38	5,12	5,03	5,18	4,77
2). Gas Alam Cair (LNG)	16,49	16,59	15,98	15,05	14,38
b. Industri Bukan Migas	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23
4. Listrik, Gas & Air Bersih	0,43	0,41	0,42	0,46	0,48
a. Listrik	0,57	0,57	0,59	0,63	0,65
b. Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Air Bersih	0,44	0,45	0,45	0,47	0,48
5. Konstruksi	0,56	0,59	0,60	0,65	0,69
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	0,47	0,50	0,51	0,53	0,54
a. Perdagangan Besar dan Eceran	0,50	0,54	0,55	0,57	0,58
b. Hotel	0,31	0,31	0,32	0,32	0,33
c. Restoran	0,29	0,29	0,32	0,34	0,37
7. Pengangkutan dan Komunikasi	0,66	0,63	0,61	0,62	0,65
a. Pengangkutan	1,24	1,28	1,31	1,36	1,46
1). Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2). Angkutan Jalan Raya	0,77	0,79	0,83	0,87	0,90
3). Angkutan Laut	1,18	1,31	1,41	1,50	1,57
4). Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	3,93	4,06	4,13	4,47	4,70
5). Angkutan Udara	0,97	0,97	0,90	0,91	1,00
6). Jasa Penunjang Angkutan	2,02	2,06	2,13	2,23	2,47
b. Komunikasi	0,19	0,17	0,17	0,17	0,18
8. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan	0,31	0,32	0,34	0,36	0,40

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
a. Bank	0,19	0,21	0,22	0,26	0,35
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17
c. Jasa Penunjang Keuangan	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03
d. Real Estat	0,43	0,45	0,47	0,48	0,50
e. Jasa Perusahaan	0,44	0,45	0,47	0,49	0,50
9. Jasa-jasa	0,21	0,22	0,22	0,23	0,25
a. Pemerintahan Umum	0,37	0,38	0,39	0,42	0,47
b. Swasta	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10
1). Jasa Sosial Kemasyarakatan	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
2). Jasa Hiburan dan Rekreasi	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07
3). Jasa Perorangan dan Rumah tangga	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10

Nilai LQ dihitung menggunakan PDRB ADHK Tahun 2000

Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Nilai *location quotient* subsektor pertambangan tanpa migas, sub sektor minyak dan gas bumi, subsektor pengilangan minyak bumi, dan subsektor gas alam cair sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa *share* subsektor tersebut untuk Provinsi Kalimantan Timur secara proporsional lebih tinggi dari nasional. Provinsi Kalimantan Timur memiliki keunggulan komparatif pada sektor-sektor tersebut dibanding daerah-daerah lain. Dalam sektor industri pengolahan lainnya belum terdapat subsektor yang cukup berkembang selain yang dipengaruhi oleh minyak dan gas. Oleh sebab itu, Provinsi Kalimantan Timur perlu mengembangkan subsektor-subsektor industri pengolahan lain khususnya yang memiliki kaitan kuat dengan komoditas unggulan daerah.

Tabel 4
Perubahan Jumlah Orang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan 2010-2014

No.	Lapangan Pekerjaan	2010	2014 (Feb)	Perubahan
1	Pertanian	494.372	425.361	-69.011
2	Pertambangan	88.052	150.695	62.643
3	Industri Pengolahan	80.776	95.951	15.175
4	Listrik, Gas, Air	3.666	11.719	8.053
5	Bangunan	81.385	116.357	34.972
6	Perdagangan, Hotel, Restoran	300.879	393.744	92.865
7	Angkutan & Telekomunikasi	58.211	98.126	39.915
8	Keuangan	31.034	72.262	41.228
9	Jasa-Jasa	236.188	388.701	152.513
	Total	1.374.563	1.752.916	378.353

Sumber : BPS, 2013

Selama periode 2010-2014 jasa-jasa mampu menciptakan lapangan kerja secara signifikan meskipun memberikan kontribusi kecil pada perekonomian (Tabel 4). Ke depan, sektor industri pengolahan masih perlu berkembang lagi sehingga mampu

menyerap angkatan kerja baru dan menyerap tenaga kerja yang menumpuk di sektor perdagangan dan jasa-jasa yang kurang produktif.

Pertumbuhan sektor industri pengolahan memiliki arti yang sangat strategis bagi perekonomian daerah dalam dua hal. Pertama, permintaan terhadap produk manufaktur relatif lebih elastis terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dibanding permintaan terhadap komoditas pertanian primer. Kecenderungan meningkatnya pendapatan masyarakat dan bertambahnya proporsi kelas menengah diperkirakan akan disertai dengan meningkatnya permintaan barang-barang konsumsi yang dihasilkan dari sektor industri. Kedua, sektor industri pengolahan memiliki kelebihan dibanding sektor-sektor lain dalam penciptaan nilai tambah, dan dampak berganda bagi pengembangan sektor-sektor lain melalui kaitan ke depan (sektor pengguna) dan ke belakang (sektor penyedia input), serta penciptaan lapangan kerja.

2. Kurangnya Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Dari sisi pengeluaran (penggunaan) pendorong utama pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur adalah ekspor dan impor terkait dengan keberadaan sumber daya alam minyak dan gas bumi di Kalimantan Timur (Tabel 5). Pada tahun 2009, ekspor mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) cukup tajam. Hal ini tampaknya terkait dengan krisis ekonomi dunia yang diiringi pelemahan permintaan komoditas ekspor dari negara-negara maju. Pada tahun-tahun sebelumnya peranan ekspor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sangat tinggi dan dominan.

Tabel 5
PDRB Menurut Penggunaan 2013

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Konsumsi Rumah Tangga	16,36	18,49
2.	Konsumsi Lembaga Nirlaba	0,26	0,41
3.	Konsumsi Pemerintah	6,27	5,61
4.	PMTB	15,86	18,60
5.	Perubahan Stok	0,90	1,05
6.	Ekspor	128,23	119,85
7.	Impor	67,90	64,01
Total		100,00	100,00

Sumber : BPS, 2013

Dengan menyusutnya volume ekspor, pertumbuhan daerah pada tahun 2009 ditopang oleh konsumsi masyarakat. Ada dua hal yang bisa dipetik sebagai pelajaran. Pertama, pertumbuhan yang terlalu bertumpu pada ekspor sangat rentan terhadap gejolak ekonomi dunia. Kontraksi sektor-sektor yang berorientasi ekspor berpotensi diikuti pengurangan tenaga kerja yang dapat berakibat pada meningkatnya pengangguran di daerah. Kedua, pertumbuhan yang terlalu bertumpu pada konsumsi masyarakat memiliki batas dan tidak berkelanjutan. Dalam jangka menengah kondisi ini akan mengurangi potensi tabungan masyarakat. Padahal tabungan sangat penting bagi perekonomian karena dapat menjadi sumber investasi sektor produktif melalui intermediasi perbankan.

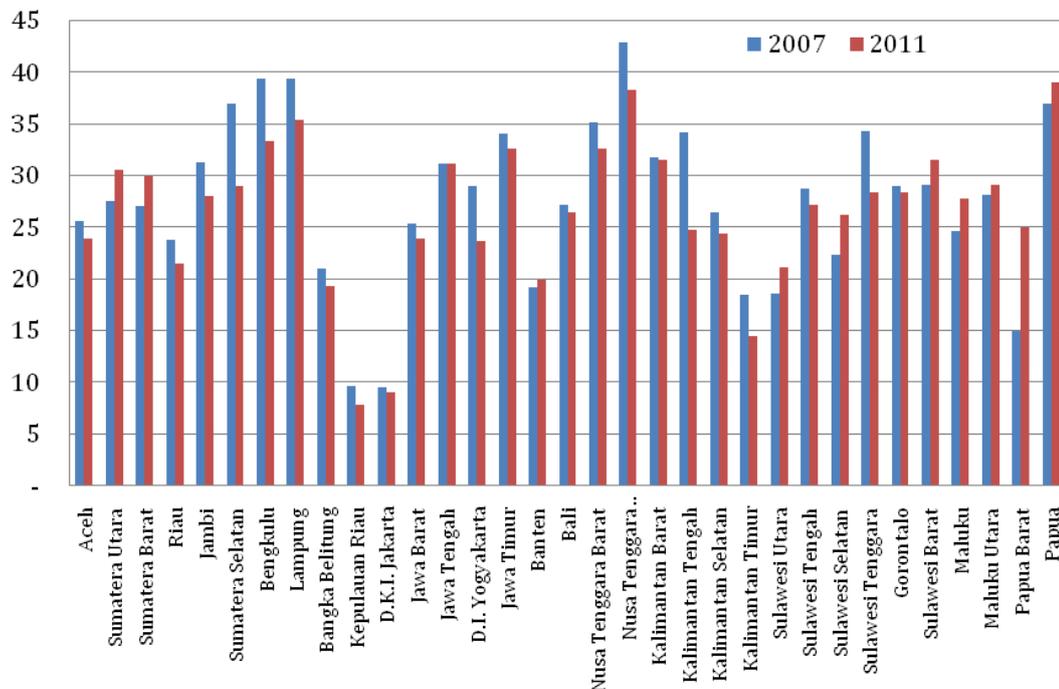
Oleh karena itu, tantangan yang harus diatasi adalah mendorong terciptanya keseimbangan sumber-sumber pertumbuhan khususnya dengan meningkatkan peran investasi (pembentukan modal tetap bruto) dalam perekonomian daerah.

Mengingat pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, hal yang perlu ditingkatkan adalah iklim usaha di daerah. Iklim usaha yang kondusif bagi investasi terbentuk dari kualitas regulasi yang konsisten, perpajakan yang transparan dan tidak tumpang tindih, pelayanan perijinan yang efisien, dan kelembagaan penyelesaian konflik yang efektif. Langkah penting dalam perbaikan pelayanan perijinan adalah pelaksanaan dan penerapan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara sungguh-sungguh dan konsisten. Dalam hal ini, semua kabupaten/kota di Kalimantan Timur secara formal telah memiliki badan/kantor yang menyelenggarakan PTSP. Ukuran keberhasilan pelaksanaan PTSP tersebut adalah peningkatan efisiensi perijinan yang harus tercermin dari menurunnya biaya dan waktu yang diperlukan oleh para pelaku usaha.

3. Rendahnya Kualitas lapangan Kerja

Salah satu penyebab dari rendahnya PDRB/kapita dan masih tingginya kemiskinan daerah adalah rendahnya kualitas lapangan kerja yang tersedia. Kondisi ini dapat diamati dari tingginya persentase pekerja dengan status pekerjaan kurang berkualitas, yakni pekerja bebas pertanian, pekerja bebas non pertanian, dan pekerja tak dibayar. Para pekerja di kelompok ini sangat rentan untuk terjerumus dalam lingkaran kemiskinan karena sifat pekerjaan yang tidak pasti dan umumnya mendapatkan upah yang sangat rendah.

Gambar 9
Persentase Pekerjaan Kurang Berkualitas



Sumber: BPS, 2012

Tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Timur yang tinggi disebabkan oleh terbatasnya sektor pertambangan dan penggalian dalam menyerap tenaga kerja. Pada tahun 2011, persentase pekerjaan kurang berkualitas di Kalimantan Timur menurun dari setahun sebelumnya, dan merupakan nilai terendah di Wilayah Kalimantan (Gambar 9). Penurunan tingkat pengangguran juga melambat sejak tahun 2008. Gejolak pasar dunia tentu saja berdampak terhadap ekspor komoditas andalan ekspor Kalimantan Timur. Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah perlunya mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian yang dapat menciptakan lapangan kerja alternatif dan lebih berkualitas serta memberikan nilai tambah dan pendapatan yang lebih besar.

4. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah

Optimalisasi posisi Kalimantan Timur yang dapat mendukung pengembangan wilayah Kalimantan membutuhkan dukungan prasarana perhubungan yang baik khususnya dalam memperlancar lalu lintas penduduk dan distribusi barang. Salah satu prasarana utama adalah jalan. Provinsi Kalimantan Timur dilayani oleh jaringan jalan sepanjang 14.767 km. Ketersediaan jaringan jalan di Kalimantan Timur masih sangat rendah apabila diukur dari kepadatan jalan (panjang jalan per kilometer persegi) dan berada di bawah kepadatan jalan nasional (Tabel 6).

Tabel 6
Kepadatan Jalan dan PDRB Per Kapita Provinsi Tahun 2012

No	Provinsi	PDRB per kapita (Ribu Rp)	Kepadatan Jalan
1	DKI Jakarta	111.913	1.068,36
2	DIY	16.054	146,56
3	Bali	20.948	130,28
4	Jawa Timur	26.274	95,37
5	Jawa Tengah	16.864	88,75
6	Jawa Barat	21.274	72,08
7	Sulawesi Selatan	22.151	69,68
8	Banten	19.038	66,81
9	Sulawesi Utara	22.624	57,89
10	Lampung	18.460	56,44
11	Kep. Riau	50.174	54,95
12	Sumatera Barat	22.035	52,36
13	Sumatera Utara	26.185	49,50
14	NTB	10.691	43,55
15	Gorontalo	10.703	40,85
16	Sulawesi Barat	17.012	40,62
17	NTT	7.236	39,95
18	Bengkulu	13.522	38,99
19	Aceh	20.164	38,76
20	Sulawesi Tenggara	13.112	30,71
21	Kep. Bangka Belitung	26.784	29,93
22	Sulawesi Tengah	21.052	29,73
23	Kalimantan Selatan	20.051	29,28
24	Riau	79.786	27,25
25	Jambi	22.508	24,81

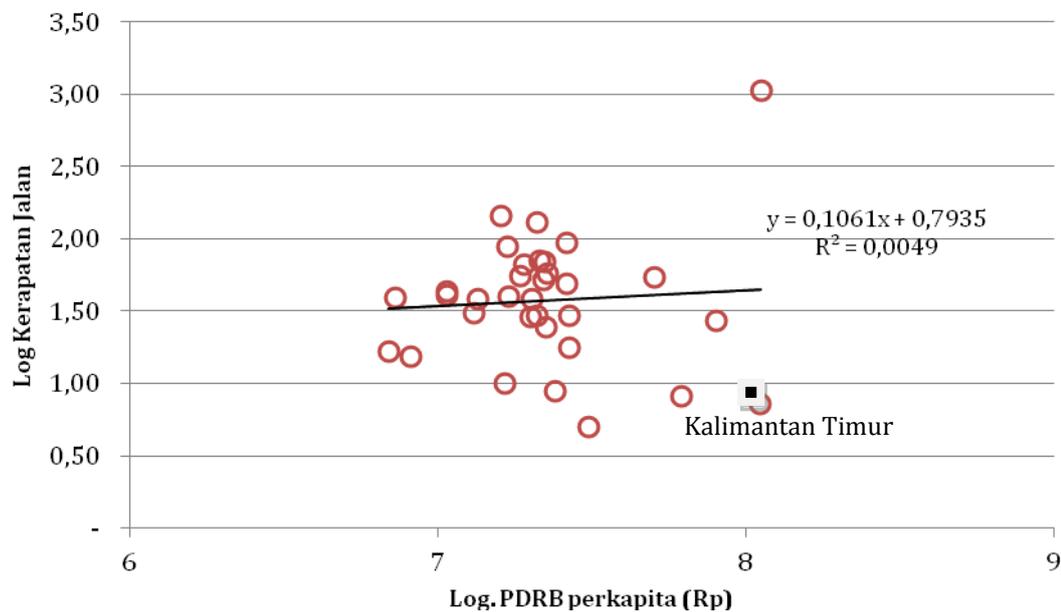
No	Provinsi	PDRB per kapita (Ribu Rp)	Kerapatan Jalan
26	Sumatera Selatan	26.742	17,86
27	Maluku Utara	6.929	16,72
28	Maluku	8.134	15,39
19	Kalimantan Barat	16.421	10,00
30	Kalimantan Tengah	23.987	8,96
31	Papua Barat	61.462	8,24
32	Kalimantan Timur	111.210	7,22
33	Papua	30.713	5,06
	Indonesia	33.531	25,99

Sumber: BPS (2012), Statistik Kementerian PU (2013)

Dengan memperhatikan pola hubungan antara pendapatan per kapita dan kerapatan jalan wilayah untuk 33 provinsi, posisi Kalimantan Timur menunjukkan adanya hubungan yang positif antara PDB per kapita dan tingkat kerapatan jalan (Gambar 10). Kondisi ini menunjukkan bahwa pendapatan per kapita semakin tinggi diikuti dengan semakin tingginya kerapatan jalan. Provinsi yang posisinya terletak di bawah kurva linier berarti mengalami defisiensi infrastruktur jalan. Dengan kata lain, panjang jalan kurang dari yang seharusnya dimiliki suatu wilayah sesuai dengan tingkat pendapatannya. Posisi Kalimantan Timur berada di bawah kurva, menunjukkan secara kuantitas kerapatan jalan di Kalimantan Timur berada di bawah rata-rata tingkat kerapatan jalan

Gambar 10

Hubungan antara Kerapatan Jalan dan GDP Per Kapita Tahun 2012



Sumber: BPS (2013), Statistik Kementerian PU (2013)-diolah

Dari segi kualitas, kondisi jalan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 cukup baik dengan 81 persen jalan aspal. Permasalahan yang sering mengemuka yaitu kerusakan

jalan. Hal ini tentu menjadi penghambat peningkatan produktivitas sektor pertanian dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi bagi pengembangan industri lokal. Tantangan yang harus dihadapi adalah peningkatan kualitas jaringan jalan di Provinsi Kalimantan Timur.

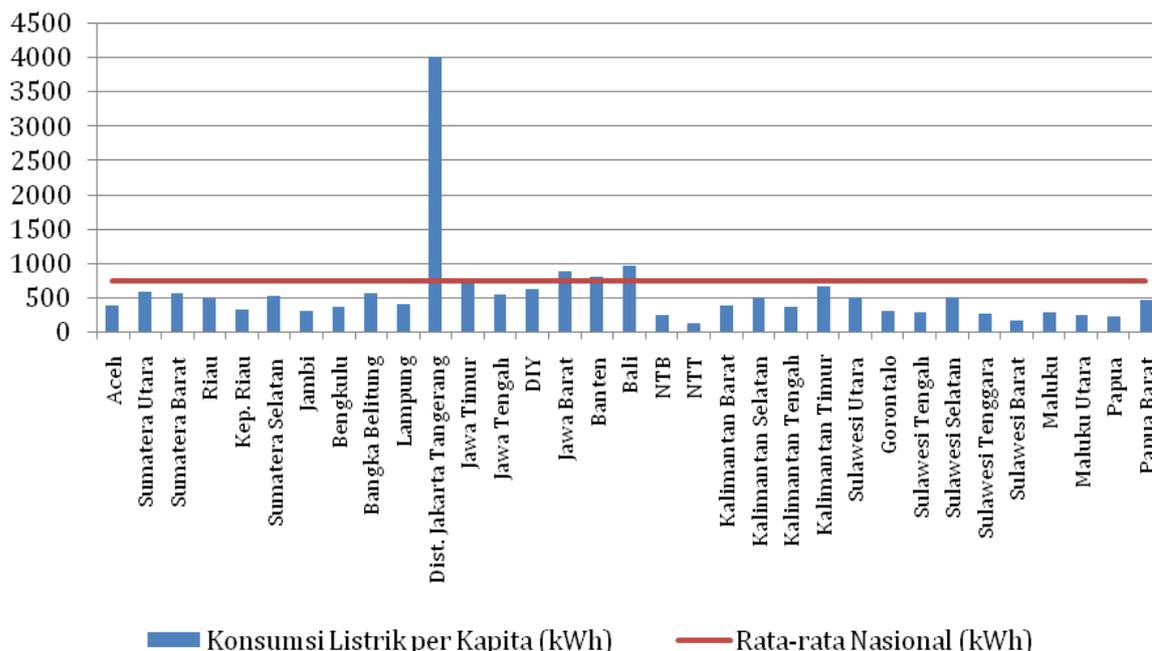
Tabel 7
Panjang Jalan Nasional Menurut Jenis Permukaan Tahun 2012

PROVINSI	JENIS PERMUKAAN JALAN								Total	
	Aspal		Kerikil		Tanah		Lainnya			
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Kalimantan Timur	1.263	81	168	11	116	8	7	0	1.554	100
Kalimantan	4.660	81	615	11	429	8	23		5.727	100
INDONESIA	42.284	79	5018	9	3504	7	2836	5	53.642	100

Sumber: : BPS, 2012

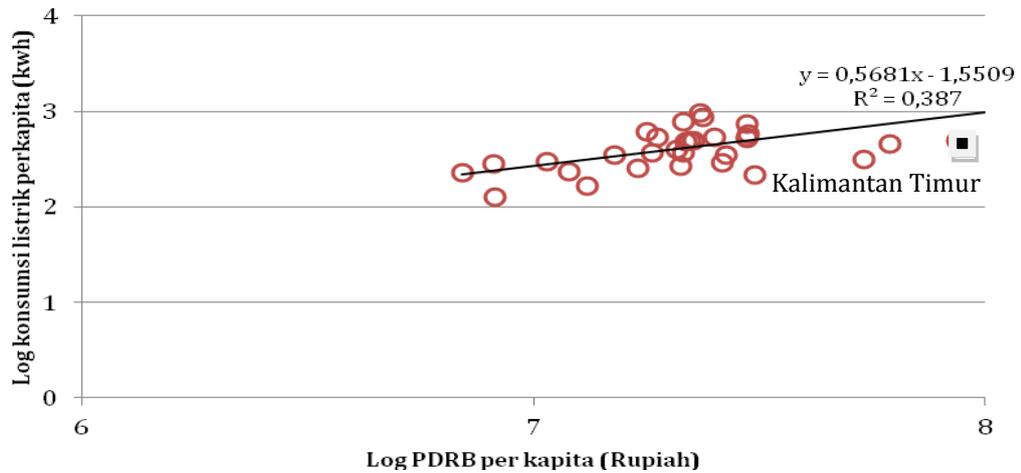
Infrastruktur lain yang juga sangat penting bagi perekonomian wilayah adalah kelistrikan. Dengan membandingkan kondisi di 33 provinsi, konsumsi listrik perkapita di Kalimantan Timur berada sedikit di bawah rata-rata nasional. Dengan membandingkan data 33 provinsi di Indonesia melalui regresi antara tingkat konsumsi listrik dan pendapatan perkapita, posisi Kalimantan Timur relatif tidak baik dibandingkan provinsi lain karena berada di bawah kurva linier. Dengan pendapatan perkapita yang tinggi posisi Kalimantan Timur mengalami defisiensi infrastruktur listrik (Gambar 12).

Gambar 11
Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) Tahun 2013



Sumber: Statistik PLN, 2013

Gambar 12
Hubungan Konsumsi Listrik dan Pendapatan Tahun 2013

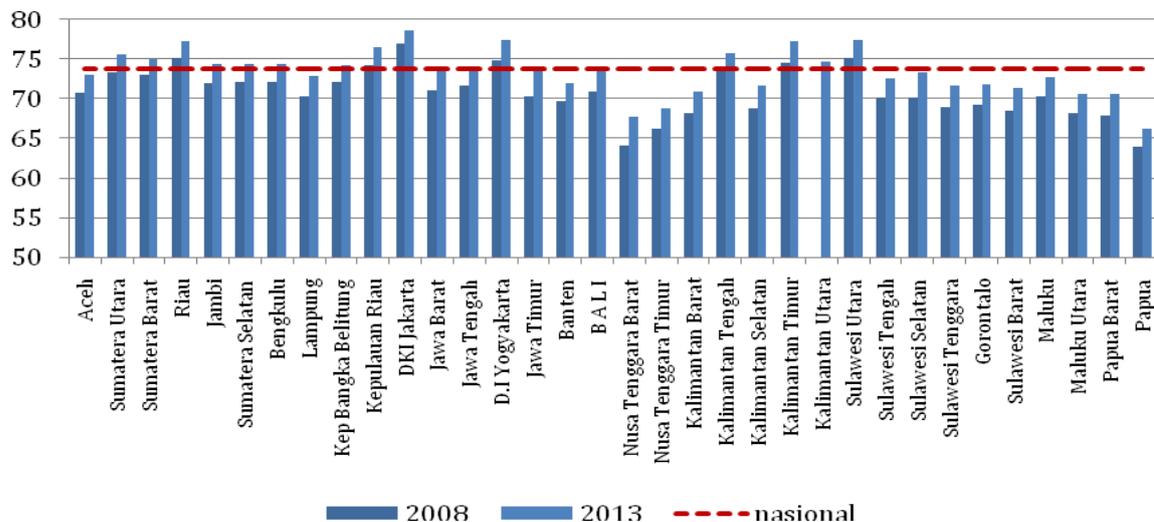


Sumber: BPS (2013), Statistik PLN (2013) - diolah

5. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin produktif angkatan kerja, dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan. Kualitas sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur relatif baik. Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Timur pada tahun 2013 berada di atas rata-rata nasional dengan menduduki peringkat 4 dari 33 provinsi. Secara garis besar seluruh komponen pembentuk IPM sudah berada di atas rata-rata nasional (Gambar 13).

Gambar 13
Nilai IPM Provinsi di Indonesia Tahun 2008 dan 2013



Sumber: BPS, 2013

Di sisi lain, kualitas sumber daya manusia juga dilihat dari struktur angkatan kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Proporsi angkatan kerja dengan ijazah minimal SMA (SMU, SMK, Diploma, Universitas) meningkat pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2008 (Tabel 8). Perbaikan struktur angkatan kerja ini perlu terus didorong untuk mendukung transformasi ekonomi daerah berbasis agroindustri.

Tabel 8
Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan

No.	Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan	2008	2014 (Feb)	Perubahan
1	≤ SD	561.502	613.530	52.028
2	SMTP	263.885	302.456	38.571
3	SMTA Umum	466.329	739.425	273.096
5	Diploma I/II/III/Akademi	50.804	48.993	(1.811)
6	Universitas	74.443	219.564	145.121
Total		1.416.963	1.923.968	507.005

Sumber: BPS, 2013

6. Terbatasnya Mobilitas Tabungan Masyarakat

Tabungan masyarakat yang dihimpun bank umum dan BPR di Provinsi Kalimantan Timur lebih tinggi dibanding pinjaman yang dikucurkan. Kondisi ini mengindikasikan dana perbankan di daerah yang bisa dikonversi menjadi investasi telah mencukupi bagi kegiatan produktif. Rasio antara pinjaman dan simpanan masyarakat di Bank Umum dan BPR fluktuatif dari 0,79 pada tahun 2007 menjadi 0,94 pada tahun 2009, dan 1,20 pada tahun 2013. Hal ini berarti bahwa kegiatan investasi di Provinsi Kalimantan Timur tetap membutuhkan suntikan dana dari luar.

Tabel 9
Rasio Simpanan dan Pinjaman di Bank Umum dan BPR Tahun 2013

Wilayah	Posisi Simpanan di Bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Posisi Pinjaman di bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Rasio Pinjaman terhadap Simpanan	Rasio PMTB terhadap Simpanan
Kalimantan Timur	84.516	101.201	1,20	0,80
Kalimantan	173,718	217.741	1,25	0,80
Nasional	3.575.891	3.322.683	0,92	0,47

Sumber: BPS, 2013

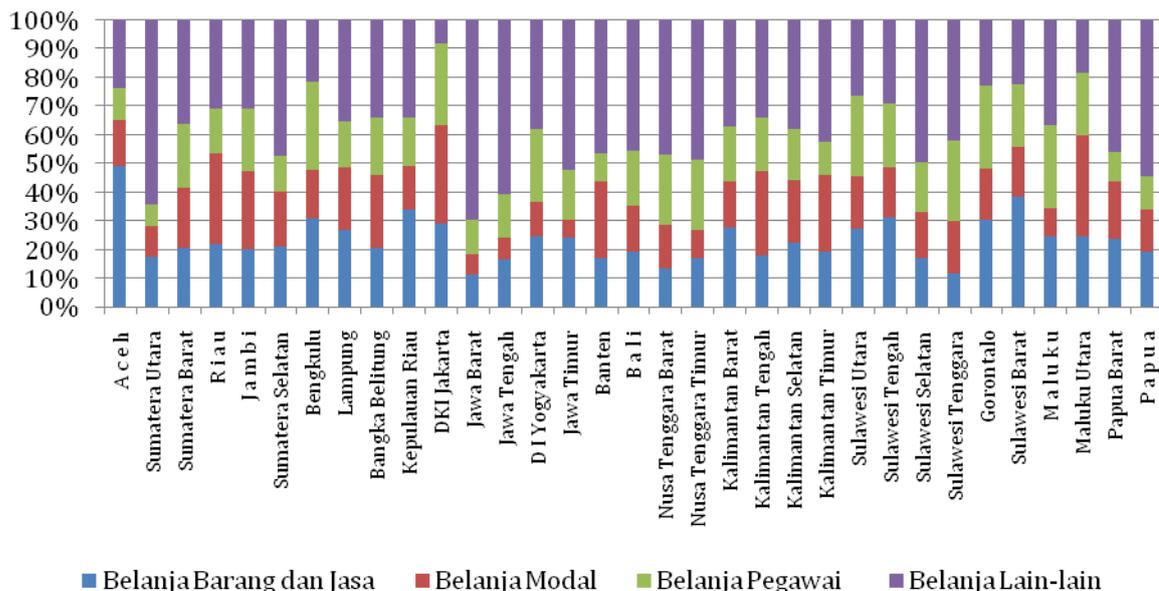
Dalam jangka panjang terbatasnya sumber dana pinjaman ini akan berisiko meningkatkan harga modal (*cost of fund*) di daerah. Dengan kondisi tingginya permintaan kredit, bank-bank umum mungkin menerapkan tingkat bunga kredit yang sama antardaerah, namun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan lembaga-lembaga keuangan non bank lainnya tentu akan meningkatkan imbal hasil (bunga) pinjaman. Kenaikan bunga pinjaman akan memberatkan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Tantangan yang harus diatasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah mengembangkan kerjasama dengan perbankan dalam penjaminan kredit dan mobilisasi tabungan masyarakat.

7. Rendahnya Kualitas Belanja Daerah

Berdasarkan data total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tahun 2013, porsi belanja modal dalam total belanja APBD di Kalimantan Timur sebesar 26,68 persen. Sementara itu porsi belanja pegawai, meliputi belanja pegawai dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung, mencapai 11,82 persen (Gambar 14).

Ke depan perlu didorong perbaikan komposisi belanja pemerintah daerah ini yang lebih mengarah pada belanja modal. Belanja modal memiliki dampak langsung yang relatif besar kepada perekonomian. Meskipun secara umum porsi investasi pemerintah lebih kecil dibandingkan investasi swasta, namun perannya tidak tergantikan dalam suatu perekonomian. Pembangunan prasarana publik seperti jalan, saluran irigasi, dan jaringan listrik mutlak memerlukan peran pemerintah. Peran investasi pemerintah ini dirasa semakin penting di daerah-daerah yang level investasi swastanya relatif rendah. Investasi pemerintah dalam konteks ini adalah sebagai perintis dan pembuka jalan bagi masuknya investasi swasta.

Gambar 14
Komposisi Belanja Pemerintah Daerah 2013



Sumber: BPS, 2013

D. Prospek Pembangunan Tahun 2015

Prospek pertumbuhan daerah di tahun 2013 akan ditentukan oleh seberapa besar realisasi investasi di daerah. Dalam konteks ini Provinsi Kalimantan Timur memiliki modal berharga. Struktur angkatan kerja mengalami pergeseran yang kondusif bagi industrialisasi. Secara relatif angkatan kerja masih didominasi lulusan setingkat SMP ke bawah, namun secara konsisten porsi lulusan SMA ke atas meningkat. Hal ini penting mengingat salah satu faktor yang mendorong pengembangan industri adalah tersedianya *pool* angkatan kerja dengan ketrampilan dan spesialisasi yang cukup dalam jumlah yang

banyak. Berdasarkan kinerja pembangunan selama ini dan modal pembangunan yang dimiliki, prospek pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 dalam mendukung pencapaian target utama RPJMN 2015-2019 sebagai berikut:

1. Sasaran pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 4,5 – 7,0 persen dapat tercapai. Di Kawasan Timur Indonesia kinerja ekonomi akan semakin membaik berkat meningkatnya produksi pertanian dan aktivitas pertambangan setelah diberlakukannya ijin ekspor mineral bagi para penambang besar. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur telah meningkat pada akhir 2014 melebihi perkiraan sebelumnya. Kalimantan Timur memiliki sumber daya alam melimpah yang berpotensi untuk terus meningkatkan PDRB di wilayah ini.
2. Sasaran pengurangan tingkat kemiskinan dalam Buku III RPJMN 2015-2019 adalah 5,1 – 3,5 persen, sedangkan pada tahun 2013 tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 6,06 persen, untuk itu diperlukan upaya konsisten untuk menurunkan tingkat kemiskinan di provinsi ini. Selama kurun waktu 2014-2019 Provinsi Kalimantan Timur harus menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 2,56 poin persentase atau 0,43 poin persentase per tahun.
3. Prospek pencapaian sasaran-sasaran utama pembangunan Provinsi Kalimantan Timur akan sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan baik internal daerah Kalimantan Timur maupun lingkungan eksternal. Dampak krisis di Eropa dan pelambatan arus perdagangan global merupakan ancaman eksternal yang bisa mengganggu kinerja perekonomian daerah melalui transmisi berkurangnya perdagangan komoditas ekspor.

E. Penutup

1. Isu Strategis Daerah

Dari hasil analisis dan informasi yang tersedia, dan memperhatikan kriteria isu strategis: (i) berdampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional; (ii) merupakan akar permasalahan pembangunan di daerah; dan (iii) mengakibatkan dampak buruk berantai pada pencapaian sasaran pembangunan yang lain jika tidak segera diperbaiki, maka isu-isu strategis Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan produktivitas sektor pertanian
- b. Industrialisasi dan pengembangan lapangan kerja berkualitas
- c. Peningkatan investasi di daerah
- d. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan
- e. Pemerataan kualitas sumber daya manusia
- f. Mobilisasi tabungan masyarakat dan fungsi intermediasi perbankan untuk mendorong akses permodalan usaha
- g. Peningkatan kualitas belanja modal pemerintah daerah

2. Rekomendasi Kebijakan

Penanganan isu-isu startegis daerah diperkirakan akandapat meningkatkan kinerja perekonomian daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan yang perlu ditempuh dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekoomi Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam hal akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna;
- b. Pemberdayaan petani dan nelayan khususnya dalam hal perbaikan akses faktor produksi (pupuk, benih, pestisida) termasuk peningkatan jaringan irigasi, penyuluhan dan promosi *brand/citra* komoditas unggulan daerah;
- c. Peningkatan kemudahan perijinan usaha;
- d. Peningkatan jaringan jalan;
- e. Peningkatan kapasitas/suplai listrik wilayah;
- f. Pemerataan akses pendidikan khususnya pendidikan menengah (umum dan kejuruan);
- g. Peningkatan porsi belanja modal APBD yang diprioritaskan pada sektor infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah;
- h. Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter di tingkat wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif: peningkatan fungsi intermediasi perbankan di daerah, penjaminan kredit dan pengendalian inflasi daerah.